

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan Renja ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan datang serta untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis serta merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun 2027.

Ranwal Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 terdiri dari 3 Program, 15 Kegiatan dan 79 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.343.451.308.648,61,-** terbilang (*satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan koma enam puluh satu rupiah*). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung untuk dapat membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Ranwal Renja Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun dan juga merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja BPKAD Tahun 2027 disusun sebagai implementasi tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Ranwal Renja merupakan rancangan awal sebagai faktor mendasar guna lebih mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah agar selaras dengan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat memberikan arah atau pedoman rencana kegiatan BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2027.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan Dokumen Renja BPKAD Tahun 2026 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2026
Pit. KEPALA


NURUL FAJRI, S.Sos.,M.T.
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP : 19790311 199803 1 002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan		
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Provinsi Lampung	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
BAB III Tujuan dan Sasaran		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	50
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		55
BAB V PENUTUP		79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Belanja Murni dan Perubahan TA. 2025.....	7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2025.....	19
Tabel 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD.....	34
Tabel 2.4 Tantangan dan Peluang BPKAD.....	36
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
Tabel 3.1 Misi Pembangunan ke-2, Sasaran, Indikator Provinsi Lampung dan Tujuan, Indikator dan Sasaran BPKAD Provinsi Lampung.....	50
Tabel 3.2 Perumusan Tujuan Tahun 2027 BPKAD	51
Tabel 3.3 Perumusan Sasaran Tahun 2027 BPKAD	52
Tabel 3.4 Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja T.A 2027 dan Rancangan awal RKPD Provinsi Lampung.....	53
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2027.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Renja Tahun 2027 berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 125 s.d. 143 beserta lampiran tentang penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Kepmen Nomor

Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara hierarki penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan serta memperhatikan keselarasan dengan program pemerintah pusat. Penyusunan Renja dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja PD
- b. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD
- c. Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

Ranwal Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 memiliki keterkaitan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dalam Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 serta penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

BPKAD Provinsi Lampung sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di bawah dan sepenuhnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, berkewajiban untuk menyampaikan Ranwal Renja Tahun 2027.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Ranwal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/lembaga (K/L);
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Ranwal Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2027 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya diteruskan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan target capaian yang dapat diukur dalam penilaian kinerja sesuai dengan target Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Renja BPKAD Provinsi Lampung ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam penentuan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2027 pada Perangkat Daerah;
- b. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Ranwal Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2027 (Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

IV. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja terhadap Renstra

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Namun, sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditetapkan pada bab ini akan dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yaitu tahun anggaran 2026.

BPKAD Provinsi Lampung untuk TA 2025 mengemban pelaksanaan 3 program, 15 kegiatan dan 78 sub kegiatan. Total Pagu Anggaran Perubahan tahun 2025 **Rp1.385.415.232.027,94** (*satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar empat ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah*) dengan realisasi anggaran APBD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV BPKAD Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp974.626.994.459** (*sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*). Hal dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Struktur Belanja Murni dan Perubahan TA 2025
BPKAD Provinsi Lampung

Uraian	Murni	Perubahan
	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Belanja Daerah	1.625.110.295.100,27	1.385.415.232.027,94
Belanja Operasi	174.627.423.299,49	176.329.502.143,47
Belanja Pegawai	122.951.582.259,49	133.906.251.608,47
Belanja Barang dan Jasa	36.675.841.040,00	19.871.980.535,00
Belanja Modal	1.737.240.000	490.061.000
Belanja Tak Terduga	42.472.500.000	9.236.250.000
Belanja Transfer	1.406.273.131.801,27	1.199.359.418.884,47

Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran pada Renja Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 163.556.082.758,- dan terealisasi Rp.139.964.077.906,- (85,57%) terdiri dari 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan, yaitu :

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.75.778.990,- realisasi Rp.75.271.747,- (99,33%).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp.7.969.100,- dan realisasi Rp.7.514.843,- (94,30%).

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD dengan anggaran Rp.8.779.840,- dan realisasi Rp.8.327.164,- (94,84%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.8.690.400,- dan realisasi Rp.8.605.974,- (99,03%).
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.4.911.400,- dan realisasi Rp.4.886.319,- (99,49%).
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp.10.426.170,- dan realisasi Rp.10.052.502,- (96,42%).
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.33.444.100,- dan realisasi Rp.33.227.992,- (99,35%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.137.196.704.888,- realisasi Rp. 115.577.435.350,- (84,24%).
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp.22.568.280.750,- dan realisasi Rp.21.511.336.042,- (95,32%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp.25.000.000,- dan realisasi Rp.23.974.737,- (95,90%).
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp.235.741.000,- dan realisasi Rp.232.718.405,- (98,72%).

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp.32.937.600,- dan realisasi Rp.29.418.798- (89,32%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.4.884.970,- realisasi Rp.4.884.900,- (100%).
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi Rp. 24.962.896,- (99,85%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp.,- realisasi Rp.,- (0%).
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.,- realisasi Rp.,- (0%).
- c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.,- realisasi Rp.,- (0%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.292.094.270,- realisasi Rp.269.856.580,- (92,39%).

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp.33.896.130,- realisasi Rp.33.783.000,- (99,67%).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.52.838.400,- realisasi Rp.52.717.742,- (99,77%).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp.70.637.860,- realisasi Rp.62.482.265,- (88,45%).
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp.298.677.800,- realisasi Rp.122.480.000,- (41,01%).
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.946.484.250,- realisasi Rp.631.027.374- (66,67%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.133.802.700,- realisasi Rp.57.481.350,- (53,86%).
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.,- realisasi Rp.,- (0%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.734.575.860 realisasi Rp.729.100.000,- (99,25%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.477.984.450,- realisasi Rp.290.564.726,- (60,79%).
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.303.624.000,- realisasi Rp.161.967.200,- (53.34%).

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.217.832.253.416,- dan terealisasi Rp.829.185.133.902,- (68,08%) terdiri dari 6 kegiatan dan 36 sub kegiatan, yaitu

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan anggaran sebesar Rp.174.744.300,- dan realisasi Rp.165.700.460,- (94,82%).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan anggaran sebesar Rp.174.799.000,- dan realisasi Rp.165.479.465,- (94,76%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.189.528.200,- dan realisasi Rp.131.165.675,- (69,21%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.80.694.000,- dan realisasi Rp.72.161.362 (89,43%).

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.46.638.796,- dan realisasi Rp.46.417.365,- (99,53%).
- f. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.113.434.900,- dan realisasi Rp.110.398.688,- (97,32%).
- g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan anggaran sebesar Rp.1.036.574.000,- dan realisasi Rp.989.430.340,- (95,45%).
- h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan anggaran sebesar Rp.1.045.322.400,- dan realisasi Rp.1.007.079.247,- (96,34%).
- i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan anggaran sebesar Rp.96.711.240,- dan realisasi Rp.70.160.077,-(72,55%).
- j. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp.60.677.300,- dan realisasi Rp.12.206.003,- (20,12%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.241.508.800,- dan realisasi Rp.195.997.714,- (81,16%).
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

- APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.240.554.400,- dan realisasi Rp.205.239.835,- (85,32%).
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.179.195.100,- dan realisasi Rp.147.023.155,- (82,05%).
 - d. Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.67.587.700,- dan realisasi Rp.40.461.150,- (59,86%).
 - e. Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.67.060.890,- dan realisasi Rp.,- (0%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.372.497.000,- dan realisasi Rp.371.429.206,- (99,71%).
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dengan anggaran sebesar Rp.11.828.600,- dan realisasi Rp.11.820.275,- (99,93%).
- c. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan anggaran sebesar Rp.157.171.045,- dan realisasi Rp.152.463.240,- (97,00%).
- d. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.20.610.100,- dan realisasi Rp.5.580.367,- (27,08%).
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitas Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan anggaran

sebesar Rp.44.000.900,- da realisasi Rp.43.965.863,- (99,92%)

- f. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan anggaran sebesar Rp.41.608.700,- dan realisasi Rp.41.392.704,- (99,48%).
- g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan anggaran sebesar Rp.74.230.200,- dan realisasi Rp.73.822.227,- (99,45%).
- h. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan anggaran sebesar Rp.234.011.700,- dan realisasi Rp.233.582.700,- (99,39%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.31.712.000,- dan realisasi Rp.31.314.254,- (98,75%).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran, dengan anggaran sebesar Rp.330.106.935,- dan realisasi Rp.221.578.065,- (67,12%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

- Pelaksanaan APBDP, dengan anggaran sebesar Rp.426.912.860,- dan realisasi Rp.240.860.367,- (56,42%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan anggaran sebesar Rp.117.120.350,- dan realisasi Rp.49.126.719,- (41,95%).
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.18.637.500,- dan realisasi Rp.18.046.308,- (96,83%).
 - f. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.98.195.200,- dan realisasi Rp.59.430.185,- (60,52%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.83.897.700,- dan realisasi Rp.19.096.067,- (22,76%).
- b. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp.11.000.000.000,- dan realisasi Rp.11.000.000.000,- (100%).
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan anggaran sebesar Rp.11.236.250.000,- dan realisasi Rp.1.493.747.989,- (13,29%).
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.1.188.362.000.000,- dan realisasi Rp.810.742.645.577,- (68,22%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.257.877.600,- dan realisasi Rp.41.130.210,- (15,95%).
- b. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.999.413.686,- dan realisasi Rp.889.413.686,- (89%).
- c. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.99.184.000,- dan realisasi Rp.86.767.357,- (87,48%).

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp.6.029.476.969,- dan terealisasi Rp.5.477.782.651,- (90,85%) terdiri dari 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan, yaitu :

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga, dengan anggaran Rp.286.197.370,- dan realisasi Rp.234.054.750,- (81,78%).
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.11.591.220,- dan realisasi Rp.5.509.598,- (47,53%).
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.11.400.990,- dan realisasi Rp.8.050.087,- (70,61%).
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.233.905.536,- dan realisasi Rp.216.536.039,- (92,57%).

- e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.22.046.300,- dan realisasi Rp.13.231.150,- (60,02%).
- f. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.359.553.100,- dan realisasi Rp.326.826.151,- (90,90%).
- g. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.3.819.703.100,- dan realisasi Rp.3.554.435.564,- (93,06%).
- h. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp. 296.335.415,- dan realisasi Rp.225.240.186,- (76,01%).
- i. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.117.148.156,- dan realisasi Rp.114.872.366,- (98,06%).
- j. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.457.180.362,- dan realisasi Rp.443.284.005,- (96,96%).
- k. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.254.971.600,- dan realisasi Rp.234.904.792,- (92,13%).
- l. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.66.526.600,- dan realisasi Rp.47.970.490,- (72,11%).
- m. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.92.917.220,- dan realisasi Rp.52.867.473,- (56,90%).

Berdasarkan data realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik sebesar 82,99%. Adapun rata-rata

capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV ini adalah sebesar 87,21%.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang tahapan Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuatkan rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2027		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10	11=(10/5)
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
05.02.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
05.02.01.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	5	Dokumen	5	100
05.02.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100

05.02.01.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan P-RKA SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.01.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPAD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.01.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen P-DPA SKPAD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen P-DPA SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.01.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan lapdoran hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.01.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100	8	Laporan	8	100
05.02.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
05.02.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	139/14	Orang/Bulan	139/14	Orang/Bulan	139/14	Orang/Bulan	139/14	Orang/Bulan	100	139/14	Orang/Bulan	139/14	100
05.02.01.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	12	100

05.02.01.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	2	100
05.02.01.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	3	100
05.02.01.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100	16	Laporan	16	100
05.02.01.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
05.02.01.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
05.02.01.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	1	100
05.02.01.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	Orang	20	Orang	20	Orang	20	Orang	100	20	Orang	20	100

05.02.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500	Orang	500	Orang	500	Orang	500	Orang	100	500	Orang	500	100
05.02.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
05.02.01.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100	3	Paket	3	100
05.02.01.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100	3	Paket	3	100
05.02.01.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100	2	Paket	2	100
05.02.01.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	100
05.02.01.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100	3	Paket	3	100
05.02.01.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	100
05.02.01.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	100
05.02.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
05.02.01.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit	8	Unit	8	Unit	8	Unit	100	8	Unit	8	100

05.02.01.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100	20	Unit	20	100
05.02.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
05.02.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTHL, PPTK, dll)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	100
05.02.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
05.02.01.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	100	18	Unit	18	100
05.02.01.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55	Unit	55	Unit	55	Unit	55	Unit	100	55	Unit	55	100
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
05.02.02.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah														
05.02.02.01.01	Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	100

05.02.02.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	100
05.02.02.01.03	Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	100	48	Dokumen	48	100
05.02.02.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	100	48	Dokumen	48	100
05.02.02.01.05	Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	100	48	Dokumen	48	100
05.02.02.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	100	48	Dokumen	48	100
05.02.02.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.02.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.02.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	100

05.02.02.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.02.02	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/ Kota														
05.02.02.02.02	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	2	100
05.02.02.02.03	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	2	100
05.02.02.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	2	100

05.02.02.02.05	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	15	Dokumen	15	Dokumen	15	Dokumen	15	Dokumen	100	15	Dokumen	15	100
05.02.02.02.06	Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.02.03	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah														
05.02.02.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12000	Dokumen	12000	Dokumen	12000	Dokumen	12000	Dokumen	100	12000	Dokumen	12000	100
05.02.02.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.02.03.03	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	100	48	Dokumen	48	100
05.02.02.03.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10	Dokumen	10	100
05.02.02.03.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100

05.02.02.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.02.03.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100	7	Dokumen	7	100
05.02.02.04	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah														
05.02.02.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100	14	Laporan	14	100
05.02.02.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	100

05.02.02.04.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	3	100
05.02.02.04.07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	4	100
05.02.02.04.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	36	Orang	36	Orang	36	Orang	36	Orang	100	36	Orang	36	100
05.02.02.04.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	4	Lembaga	4	Lembaga	4	Lembaga	4	Lembaga	100	4	Lembaga	4	100
05.02.02.05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah														
05.02.02.05.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	13	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	100	13	Laporan	13	100

05.02.02.05.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.02.05.09	Sub Kegiatan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.02.05.10	Sub Kegiatan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.02.06	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah														
05.02.02.06.01	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.02.06.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.02.06.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	222	Orang	222	Orang	222	Orang	222	Orang	100	222	Orang	222	100
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														

05.02.03.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
05.02.03.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.03.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.03.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	100
05.02.03.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	100
05.02.03.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.03.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	2	100
05.02.03.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.03.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.03.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100

05.02.03.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	100
05.02.03.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	2	100
05.02.03.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	100
05.02.03.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/kota	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100	50	Orang	50	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Rencana Kinerja BPKAD Provinsi Lampung sangat berkaitan dengan terciptanya tertib administrasi keuangan yang baik dan efisien dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja tetapi juga *outcomes* serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Keberhasilan capaian kinerja BPKAD pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak pada capaian kinerja pelayanan.

Berikut ini adalah capaian kinerja program selama tahun anggaran 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program yang berisi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 85,17%. Hal ini dikarenakan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan sub kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terlaksana sepenuhnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah berisikan Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 95,71%. Hal ini dikarenakan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD serta sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah tidak terlaksana sepenuhnya.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berisikan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah tersusun sesuai dengan target sehingga capaian indikator program mencapai 80,77%. Karena sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah serta sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak terlaksana sepenuhnya.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	%	Dalam rangka meningkatnya Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada UU no.12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang dievaluasi dibagi Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang diterima dikali 100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%		Jumlah laporan aset daerah yang disusun berdasarkan yang diamanatkan pada Permendagri No 47 th 2021	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

					tentang Tatacara Pembukuan Inventarisasi daan Pelaporan dibagi jumlah laporan yang diterima dibagi 100%	
		Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	%		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP dibagi dengan laporan keuangan perangkat daerah yang diterima dibagi 100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Provinsi Lampung

Isu-isu strategis BPKAD Provinsi Lampung dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset yang belum optimal
2. Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Ranperda APBD, PAPBD dan P2APBD yang tidak optimal
3. Optimalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan

2.3.1 Permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Lampung

Permasalahan :

- a. Penyusunan laporan aset yang belum sesuai dengan kaidah perundangan
- b. Inventarisasi aset yang belum optimal terutama untuk asset yang tidak digunakan secara optimal maupun untuk aset yang masih belum jelas kepemilikannya
- c. Kesadaran pengelola barang dalam Menyusun laporan asetnya dan kurang diberlakukannya sanksi atas keterlambatan dan kesalahan dalam penyusunan laporan
- d. Kurangnya Kapasitas Pelaksana dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan tahapan penganggaran sesuai aturan yang berlaku.

- e. Kurangnya kapasitas pelaksana sehingga penyusunan Laporan keuangan hampir mencapai batas waktu
- f. Kurangnya komitmen dari pemerintah daerah kabupaten/Kota untuk melaksanakan tahapan evaluasi yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan

2.3.2 Tantangan dan Peluang BPKAD Provinsi Lampung

Tantangan adalah hal-hal yang meningkatkan semangat dan tekad untuk mengatasi masalah. Peluang adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah selanjutnya akan dijabarkan melalui tabel berikut ini tantangan dan peluang yang dimiliki oleh BPKAD Provinsi Lampung. Tantangan dan Peluang ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Perangkat Daerah untuk tetap fokus dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Tabel 2.4
Tantangan dan Peluang BPKAD

TANTANGAN	PELUANG
<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan aset yang belum sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah; b. Inventarisasi aset yang belum optimal, khususnya untuk aset yang tidak dimanfaatkan secara produktif atau belum jelas status kepemilikannya; c. Rendahnya kesadaran pengelola barang dalam penyusunan laporan aset, serta lemahnya penerapan sanksi terhadap keterlambatan dan kesalahan laporan; d. Kapasitas pelaksana yang belum memadai dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan tahapan penganggaran sesuai regulasi; e. Keterbatasan kapasitas yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang hampir mencapai batas akhir waktu; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu laporan aset; b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pengelolaan aset, penyusunan laporan keuangan, dan peanggaran berbasis regulasi terbaru; c. Kerja sama antarperangkat daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian status kepemilikan aset; d. Pemanfaatan aset yang belum optimal untuk kegiatan produktif, sehingga dapat menambah nilai manfaat dan potensi pendapatan daerah; e. Penerapan sanksi yang tegas bagi keterlambatan dan kesalahan laporan, sekaligus pemberian insentif bagi pengelola barang yang berpotensi; f. Penguatan komitmen dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi rutin dan asistensi teknis.

f. Kurangnya komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan evaluasi sesuai jadwal.	
---	--

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2027 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang mengacu pada Renstra BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan merupakan prioritas dari BPKAD Provinsi Lampung. Berikut review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2027

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN	CATATAN
				CAPAIAN	INDIKATIF (Rp)				CAPAIAN	DANA (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	169.151.750.267,89	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		322.929.458,35	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	149.413.798,00	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	23.821.600,00	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	23.398.800,00	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.074.480,00	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.364.980,00	
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan lapdoran hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan lapdoran hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	26.636.000,00	
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja PD	8 laporan		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja PD	8 laporan	75.219.800,35	

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu		165.510.344.539,54	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/14 Bulan		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/14 Bulan	142.298.033.539,54	
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.821.940.000,00	
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	32.800.000,00	
11	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	246.126.000,00	
12	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	16 Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	16 Laporan	111.445.000,00	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu		50.000.000,00	
13	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	
14	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu		542.680.000,00	
15	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	123.000.000,00	

16	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	409.840.000,00	
17	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	500 Orang		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	500 Orang	9.840.000,00	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Umum yang tepat waktu			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Umum yang tepat waktu		1.519.973.190,00	
18	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	448.005.500,00	
19	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	9.840.000,00	
20	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.840.000,00	
21	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9.840.000,00	
22	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	3 Paket		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	3 Paket	34.806.840,00	
23	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	199.062.850,00	
24	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	800.578.000,00	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu		206.766.080,00	
25	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	126.466.560,00	
26	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	80.299.520,00	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah tepat waktu			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah tepat waktu		757.416.000,00	
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTHL, PPTK DLL)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTHL, PPTK DLL)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	757.416.000,00	

8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat waktu			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat waktu		327.741.000,00	
28	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	245.663.940,00	
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	82.077.060,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Provinsi Lampung	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100%		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Provinsi Lampung	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100%	1.166.895.762.515,72	
9	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perda dan Pergub APBD Murni dan Perubahan Tepat Waktu			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perda dan Pergub APBD Murni dan Perubahan Tepat Waktu		3.366.217.080,00	
30	Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	200.935.645,00	
31	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	200.946.295,00	
32	Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD		Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen		Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD		Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	188.659.010,00	
33	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	188.659.010,00	
34	Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen		Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	109.274.010,00	
35	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	109.274.010,00	
36	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1.062.926.900,00	
37	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1.062.926.900,00	
38	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	143.150.630,00	

39	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6 Dokumen	99.464.670,00	
10	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu		1.315.983.620,00	
40	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	1 Laporan		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	1 Laporan	377.444.115,00	
41	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	1 Laporan		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	1 Laporan	370.605.970,00	
42	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	1 Laporan		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	1 Laporan	252.922.975,00	
43	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	15 Dokumen		Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	15 Dokumen	179.142.530,00	
44	Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan		Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	135.868.030,00	
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	3 Laporan		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	3 Laporan		

	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan		
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Orang		Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Orang		
11	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Realisasi Belanja sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Realisasi Belanja sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku		1.662.034.880,00	
45	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12.000 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12.000 Dokumen	537.374.960,00	
46	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	59.459.090,00	
47	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	48 Dokumen		Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	48 Dokumen	243.772.450,00	
48	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10 Dokumen		Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10 Dokumen	105.133.875,00	
49	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	225.467.140,00	

50	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	118.756.470,00	
51	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	142.700.110,00	
52	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	7 Dokumen		Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	7 Dokumen	229.370.785,00	
12	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu		1.718.340.295,00	
53	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	14 Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	14 Laporan	118.057.175,00	
54	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	12 Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	12 Laporan	336.945.015,00	
55	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	3 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	3 Dokumen	754.285.850,00	

56	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	161.841.385,00	
57	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	36 Orang		Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	36 Orang	66.484.920,00	
58	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi		Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	4 Lembaga		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi		Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	4 Lembaga	280.725.950,00	
13	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku		1.157.049.364.869,07	
59	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	13 Laporan		Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	13 Laporan	128.153.990,00	
60	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	63.765.625.000,00	
61	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	1 Laporan		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	1 Laporan	41.969.500.000,00	
62	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	50.009.500.000,00	
63	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1.001.176.585.879,07	
14	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase PD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase PD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi		1.783.821.771,65	
64	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	128.887.311,65	

65	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1.269.110.425,00	
66	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	222 Orang		Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	222 Orang	385.824.035,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah	100%		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah	100%	7.403.795.865,00	
15	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Dokumen Aset Daerah yang tepat waktu			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Dokumen Aset Daerah yang tepat waktu		7.403.795.865,00	
67	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	436.569.320,00	
68	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	61.570.740,00	
69	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	153.261.395,00	
70	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	314.677.840,00	
71	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 Laporan		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 Laporan	97.873.050,00	
72	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan		Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	467.172.680,00	
73	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.268.994.985,00	
74	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	385.282.840,00	
75	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	355.265.130,00	
76	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	586.766.480,00	

77	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	952.728.700,00	
78	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	111.096.585,00	
79	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/kota	50 Orang		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/kota	50 Orang	212.536.120,00	
										1.343.451.308.648,61	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Tahun 2027 BPKAD Provinsi Lampung digunakan untuk melihat tantangan dan peluang Perangkat Daerah khususnya jika ditinjau dari tema Rencana Kerja Pemerintah dan arah kebijakan Nasional tahun 2027 serta tujuan, sasaran dan strategi Kementerian Keuangan dalam Renstra 2025-2029, diharapkan dapat memberi efek positif bagi peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Nasional

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Tujuan Kementerian Keuangan:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan responsif
2. Mencapai pendapatan negara yang tinggi
3. Memastikan belanja negara yang efektif, efisien dan produktif
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital
6. Mengembangkan SDM yang adaptif dan akuntabel
7. Mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern
8. Tata kelola dan sumber daya yang optimal
9. Penguatan fungsi decision support and special mission

Sasaran Strategis 1

- a. Organisasi dan sumber daya manusia yang optimal
- b. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang kredibel dan akuntabel
- c. Sistem informasi yang andal terintegrasi dan komunikasi publik yang efektif
- d. Legislasi dan advokasi yang optimal
- e. Tata kelola dan sumber daya Sekretariat Jenderal yang optimal

Sasaran Strategis 2

- a. Dukungan pengambilan kebijakan (*decision support*) yang optimal
- b. Pelaksanaan tugas khusus (*special mission*) yang optimal

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi dan berdasarkan kondisi eksternal dan internal.

Dalam dokumen RPJMD telah dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung yang digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui perwujudan visi misinya. BPKAD Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perlu untuk merumuskan tujuan dan sasaran organisasi agar pelaksanaan pembangunan dapat selaras dengan tujuan pembangunan pemerintah. Dibawah ini adalah tabel yang menggambarkan hal tersebut :

Tabel 3.1
Misi Pembangunan ke-3, Sasaran, Indikator Provinsi Lampung dan Tujuan, Indikator dan Sasaran BPKAD Provinsi Lampung

Misi ke-3	Sasaran Pembangunan	Indikator	Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD
Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.	Mewujudkan Birokrasi berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
				Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Diperlukannya analisis dalam perumusan isu strategis dari berbagai informasi penting dan fakta yang ada dengan tetap memperhatikan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah. Selanjutnya perlu untuk dilakukan pengelompokan apakah isu permasalahan tersebut berasal dari permasalahan internal ataukah eksternal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemetaan isu permasalahan untuk menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan harapan dapat dirumuskan arah kebijakan untuk menciptakan kualitas penyekenggaraan pembangunan menuju good governance yang akan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Lampung untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka dirumuskan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan tujuan dan sasaran antara lain:

3.2.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi Pemerintah Daerah.

Tabel 3.2
Perumusan Tujuan Tahun 2027

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Mewujudkan Transparansi Birokrasi	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tabel 3.3
Perumusan Sasaran Tahun 2027

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	1. Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
		2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50%
		3. Presentase tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung melaksanakan 3 program, 15 kegiatan dan 79 sub kegiatan pada tahun anggaran 2027 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.343.451.308.648,61,-** terbilang (*satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan koma enam puluh satu rupiah*).

Tabel 3.4
Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja T.A 2027 dan
Rancangan awal RKPD Provinsi Lampung

No.	Program	Kegiatan	Indikator	Ranwal RKPD	Renja 2026
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, evaluasi keuangan dan aset	√	√
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentae administrasi keuangan PD	√	√
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pemeliharaan BMD	√	√
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	√	√
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	√	√
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan BMD	√	√
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	√	√
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan BMD	√	√
2.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Perda dan Pergub APBD Murni dan Perubahan tepat waktu	√	√
		Pembinaan Pengelolaan	Presentase Ksb/Kota yang	√	√

No.	Program	Kegiatan	Indikator	Ranwal RKPD	Renja 2026
		Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	menetapkan APBD tepat waktu		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase realisasi belanja sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku	√	√
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase Perda Laporan Keuangan Pemda tepat waktu	√	√
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase kewenangan pengelolaan keuangan daerah	√	√
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Presentase sistem informasi keuangan yang akuntabel dan terintegrasikan	√	√
3.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase PD yang mengelola aset	√	√

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Sesuai tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung, maka Rencana Program dari Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2027 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pada BPKAD Provinsi Lampung capaian sasaran dan tujuan organisasi harus searah dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah dengan menetapkan program yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, maka rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan :

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan :

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Penyediaan Bahan/Material

- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Kegiatan :

2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
- b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
- d. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- e. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah

Kegiatan :

3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- h. Rekonsialisasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Kegiatan :

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub kegiatan :

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
- d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- e. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
- f. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi

Kegiatan :

5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
- b. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
- c. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
- d. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- e. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

Kegiatan :

6. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
- b. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Lampung

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Standar Harga
 - b. Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - g. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - h. Penilaian Barang Milik Daerah
 - i. Pengawasan dan Pengadaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan
- tanganan
- k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 4.1 Matriks Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Prakiraan Maju 2027

NO	Kode Rekening	PAGU 2027					PRAKIRAAN MAJU 2028 (10%)					
		Program, Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	Catatan
					CAPAIAN	INDIKATIF (Rp)				CAPAIAN	DANA (Rp)	
I	05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	169.151.750.267,89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	186.066.925.294,68	
1	05.02.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		322.929.458,35	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		355.222.404,19	
1	05.02.01.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	149.413.798,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	164.355.177,80	
2	05.02.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	23.821.600,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	26.203.760,00	
3	05.02.01.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	23.398.800,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	25.738.680,00	

				Perubahan RKA SKPD			SKPD		RKA SKPD			
4	05.02.01.0 1.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.074.480,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.281.928,00	
5	05.02.01.0 1.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.364.980,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.601.478,00	
6	05.02.01.0 1.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan lapdoran hasil koordinasi pendyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	26.636.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan lapdoran hasil koordinasi pendyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	29.299.600,00	
7	05.02.01.0 1.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja PD	8 laporan	75.219.800,35	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja PD	8 laporan	82.741.780,39	
2	05.02.01.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu		165.510.344.539 ,54	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu		182.061.378.993 ,49	

8	05.02.01.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/14 Bulan	142.298.033.539 ,54	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/14 Bulan	156.527.836.893 ,49	
9	05.02.01.0 2.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.821.940.000, 00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.104.134.000, 00	
10	05.02.01.0 2.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	32.800.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	36.080.000,00	
11	05.02.01.0 2.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	246.126.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	270.738.600,00	
12	05.02.01.0 2.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran	16 Laporan	111.445.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran	16 Laporan	122.589.500,00	
3	05.02.01.0 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu		50.000.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu		55.000.000,00	

13	05.02.01.0 3.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	27.500.000,00	
14	05.02.01.0 3.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	27.500.000,00	
4	05.02.01.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu		456.580.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu		502.238.000,00	
15	05.02.01.0 5.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	36.900.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	40.590.000,00	
16	05.02.01.0 5.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	409.840.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	450.824.000,00	
17	05.02.01.0 5.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	500 Orang	9.840.000,00	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	500 Orang	10.824.000,00	
5	05.02.01.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Umum yang tepat waktu		1.519.973.190,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Umum yang tepat waktu		1.671.970.509,00	

18	05.02.01.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	448.005.500,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	492.806.050,00	
19	05.02.01.0 6.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	9.840.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	10.824.000,00	
20	05.02.01.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.840.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	10.824.000,00	
21	05.02.01.0 6.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9.840.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.824.000,00	
22	05.02.01.0 6.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	3 Paket	34.806.840,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	3 Paket	38.287.524,00	
23	05.02.01.0 6.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	199.062.850,00	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	218.969.135,00	
24	05.02.01.0 6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	808.578.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	889.435.800,00	
6	05.02.01.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu		206.766.080,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu		227.442.688,00	

25	05.02.01.0 7.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	126.466.560,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	139.113.216,00	
26	05.02.01.0 7.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	80.299.520,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	88.329.472,00	
7	05.02.01.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah tepat waktu		757.416.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah tepat waktu		833.157.600,00	
27	05.02.01.0 8.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTHL, PPTK DLL)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	757.416.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTHL, PPTK DLL)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	833.157.600,00	
8	05.02.01.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat waktu		327.741.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat waktu		360.515.100,00	

28	05.02.01.0 9.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	245.663.940,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	270.230.334,00	
29	05.02.01.0 9.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	82.077.060,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	90.284.766,00	
II	05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Provinsi Lampung	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100%	1.166.895.762.5 15,72	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	100%	1.283.585.338.7 67,29	
9	05.02.02.0 1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perda dan Pergub APBD Murni dan Perubahan Tepat Waktu		3.366.217.080,0 0	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perda dan Pergub APBD Murni dan Perubahan Tepat Waktu		3.702.838.788,0 0	
30	05.02.02.0 1.01	Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	200.935.645,00	Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	221.029.209,50	
31	05.02.02.0 1.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	200.946.295,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	221.040.924,50	

32	05.02.02.0 1.03	Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD		Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	188.659.010,00	Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD		Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	207.524.911,00	
33	05.02.02.0 1.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	188.659.010,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	207.524.911,00	
34	05.02.02.0 1.05	Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	109.274.010,00	Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	120.201.411,00	
35	05.02.02.0 1.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	109.274.010,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	120.201.411,00	
36	05.02.02.0 1.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1.062.926.900,0 0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1.169.219.590,0 0	
37	05.02.02.0 1.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1.062.926.900,0 0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1.169.219.590,0 0	

38	05.02.02.0 1.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	143.150.630,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	157.465.693,00	
39	05.02.02.0 1.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6 Dokumen	99.464.670,00	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6 Dokumen	109.411.137,00	
10	05.02.02.0 2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu		1.315.983.620,00	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu		1.447.581.982,00	
40	05.02.02.0 2.02	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	1 Laporan	377.444.115,00	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	1 Laporan	415.188.526,50	
41	05.02.02.0 2.03	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	1 Laporan	370.605.970,00	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	1 Laporan	407.666.567,00	

42	05.02.02.0 2.04	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan	252.922.975,00	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan	278.215.272,50	
43	05.02.02.0 2.05	Sub Kegiatan Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	15 Dokumen	179.142.530,00	Sub Kegiatan Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	15 Dokumen	197.056.783,00	
44	05.02.02.0 2.06	Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	135.868.030,00	Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	149.454.833,00	
	05.02.02.0 2.08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	3 Laporan		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	3 Laporan	-	

	05.02.02.0 2.09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	
	05.02.02.0 2.11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Orang		Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Orang	-	
11	05.02.02.0 3	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Realisasi Belanja sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku		1.662.034.880,0 0	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Realisasi Belanja sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku		1.828.238.368,0 0	
45	05.02.02.0 3.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12.000 Dokumen	537.374.960,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12.000 Dokumen	591.112.456,00	
46	05.02.02.0 3.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	59.459.090,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	65.404.999,00	
47	05.02.02.0 3.03	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	48 Dokumen	243.772.450,00	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	48 Dokumen	268.149.695,00	

48	05.02.02.0 3.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10 Dokumen	105.133.875,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10 Dokumen	115.647.262,50	
49	05.02.02.0 3.05	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	225.467.140,00	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	248.013.854,00	
50	05.02.02.0 3.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	118.756.470,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	130.632.117,00	

51	05.02.02.0 3.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	142.700.110,00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	156.970.121,00	
52	05.02.02.0 3.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	7 Dokumen	229.370.785,00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	7 Dokumen	252.307.863,50	
12	05.02.02.0 4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu		1.718.340.295,00	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu		1.890.174.324,50	

53	05.02.02.0 4.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	14 Laporan	118.057.175,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	14 Laporan	129.862.892,50	
54	05.02.02.0 4.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	12 Laporan	336.945.015,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	12 Laporan	370.639.516,50	
55	05.02.02.0 4.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	3 Dokumen	754.285.850,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	3 Dokumen	829.714.435,00	
56	05.02.02.0 4.07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	161.841.385,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	178.025.523,50	

57	05.02.02.0 4.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	36 Orang	66.484.920,00	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	36 Orang	73.133.412,00	
58	05.02.02.0 4.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi		Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	4 Lembaga	280.725.950,00	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi		Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	4 Lembaga	308.798.545,00	
13	05.02.02.0 5	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku		1.157.049.364.869,07	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku		1.272.754.301.355,98	
59	05.02.02.0 5.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	13 Laporan	128.153.990,00	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	13 Laporan	140.969.389,00	
60	05.02.02.0 5.04	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	63.765.625.000,00	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	70.142.187.500,00	
61	05.02.02.0 5.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	1 Laporan	41.969.500.000,00	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	1 Laporan	46.166.450.000,00	
62	05.02.02.0 5.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	50.009.500.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	55.010.450.000,00	
63	05.02.02.0 5.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1.001.176.585.879,07	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1.101.294.244.466,98	

14	05.02.02.06	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase PD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi		1.783.821.771,65	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase PD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi		1.962.203.948,82
64	05.02.02.06.01	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	128.887.311,65	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	141.776.042,82
65	05.02.02.06.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1.269.110.425,00	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1.396.021.467,50
66	05.02.02.06.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	222 Orang	385.824.035,00	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	222 Orang	424.406.438,50
III	05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	100%	7.403.795.865,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	100%	8.144.175.451,50
15	05.02.03.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Dokumen Aset Daerah yang tepat waktu		7.403.795.865,00	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Dokumen Aset Daerah yang tepat waktu		8.144.175.451,50
67	05.02.03.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	436.569.320,00	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	480.226.252,00
68	05.02.03.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	61.570.740,00	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	67.727.814,00

69	05.02.03.0 1.03	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	153.261.395,00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	168.587.534,50	
70	05.02.03.0 1.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	314.677.840,00	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	346.145.624,00	
71	05.02.03.0 1.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 Laporan	97.873.050,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 Laporan	107.660.355,00	
72	05.02.03.0 1.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	467.172.680,00	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	513.889.948,00	
73	05.02.03.0 1.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.268.994.985,0 0	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.595.894.483,5 0	
74	05.02.03.0 1.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	385.282.840,00	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	423.811.124,00	
75	05.02.03.0 1.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	355.265.130,00	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	390.791.643,00	
76	05.02.03.0 1.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	586.766.480,00	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	645.443.128,00	

77	05.02.03.0 1.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	952.728.700,00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.048.001.570,0 0	
78	05.02.03.0 1.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	111.096.585,00	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	122.206.243,50	
79	05.02.03.0 1.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/kota	50 Orang	212.536.120,00	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/kota	50 Orang	233.789.732,00	
						1.343.451.308.6 48,61					1.477.796.439.5 13,47	

BAB V

PENUTUP

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Lampung pada Tahun 2027 telah disusun dalam dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai penjabaran dari Renstra 2025-2029 sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2027.

Pada tahun 2027 BPKAD Provinsi Lampung telah merencanakan sebanyak 3 program, 15 kegiatan dan 79 sub kegiatan. Dengan disusunnya dokumen Renja ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Lampung dapat lebih terarah, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Provinsi Lampung.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2027 ini dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas.